

**PENGARUH PERAN AUDIT INTERN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KECENDERUNGAN
KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)**

DRAFT SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**REZYA FRISKA AMANDA
98615 / 2009**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PERAN AUDIT INTERN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)

Nama : Rezya Friska Amanda
BP/NIM : 2009/98615
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2015

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Nurzi Sebrina SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199003 1 003

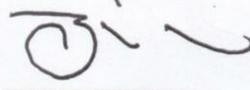
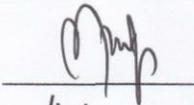
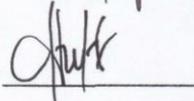
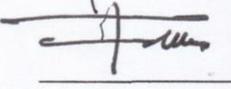
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**PENGARUH PERAN AUDIT INTERN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)**

**Nama : Rezya Friska Amanda
TM/NIM : 2009/98615
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi**

Padang, 19 Januari 2015

		Tim Penguji Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	:	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	
2. Sekretaris	:	Nurzi Sebrina, SE, M. Sc, Ak	
3. Anggota	:	Mayar Afriyenti, SE, M. Sc	
4. Anggota	:	Fefri Indra Arza, SE, M. Sc, Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezya Friska Amanda
NIM/BP : 98615/2009
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/ 3 Maret 1991
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Cendrawasih Gang Pari 26 Air Tawar Barat, Padang
No. HP/Telepon : 085263163881
Judul Skripsi : Pengaruh Peran Audit Intern dan Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil tulisan sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP atau perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 2014
Yang mem


Rezya Friska Amanda
NIM: 98615/2009

METERAI
TEMPEL
DC3F7ADF096134033
5000
LIMA RIBURUPIAH

ABSTRAK

Rezya Friska Amanda (98615/2009) **Pengaruh Peran Audit Intern dan Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang), Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2015.**

Pembimbing : **1. Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak**
2. Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran audit intern dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Padang Panjang.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *total sampling* dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan analisis jalur (*path analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran audit intern berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,088 > 2,0117$ ($sig\ 0,042 < \alpha\ 0,05$) yang berarti H_1 diterima. 2) Efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,184 > 2,0117$ ($sig\ 0,003 < \alpha\ 0,05$) yang berarti H_2 diterima. 3) Peran audit intern berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,536 > 2,0117$ ($sig\ 0,000 < \alpha\ 0,05$) yang berarti H_3 diterima.

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Auditor intern harus berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing agar kecurangan akuntansi dapat dikurangi dalam organisasi tersebut. 2) Efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah harus ditingkatkan agar kecurangan akuntansi dapat dikurangi. 3) Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel untuk menemukan variabel lain yang berpengaruh, dan 4) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan wawancara langsung, survey lapangan, dan lain-lain.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Peran Audit Intern dan Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Padang Panjang”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	13
a. Pengertian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	13
b. Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan Akuntansi	17
2. Peran Audit Intern	20
a. Pengertian Peran Audit Intern	20
b. Fungsi dan Kedudukan Audit Intern	21
c. Kegiatan dan Peranan Audit Intern	23
d. Standar Profesional Audit Intern	25
3. Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah	29
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	29

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	32
c. Elemen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	34
B. Evaluasi Hasil Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Konseptual	38
D. Hipotesis.....	40

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Populasi dan Sampel.....	41
C. Jenis Data	43
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Variabel Penelitian.....	43
G. Instrumen Penelitian.....	44
H. Uji Instrumen	45
1. Uji Validitas	45
2. Uji Reliabilitas	47
I. Uji Asumsi Klasik.....	48
1. Uji Normalitas.....	49
2. Uji Multikolinearitas	49
3. Uji Heterokedastisitas	49
J. Teknik Analisis Data	45
1. Analisis Deskriptif	50
2. Metode Analisis	51
a. Koefisien Jalur.....	52
b. Uji Koefisien Determinasi Sederhana.....	54

c. Uji F.....	54
d. Uji t	55
K. Definisi Operasional.....	55

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sampel dan Responden Penelitian	58
B. Analisis Deskriptif.....	59
C. Uji Validitas dan Reliabilitas	72
D. Uji Asumsi Klasik	74
E. Pengujian Model.....	77
F. Pembahasan	85

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	92
B. Keterbatasan	93
C. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	37
2. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang.....	42
3. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat	44
4. Instrumen Penelitian.....	45
5. Nilai <i>Corrected-Item Total Correlation</i> Instrumen Penelitian	47
6. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen	48
7. Tingkat Pengembalian Kuesioner	58
8. Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan	59
9. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
10. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	60
11. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	61
12. Distribusi Frekuensi Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	62
13. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Audit Intern	65
14. Distribusi Frekuensi Variabel Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah	68
15. Statistik Deskriptif.....	72
16. Nilai <i>Corrected-Item Total Correlation</i> Terkecil	73
17. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	73
18. Uji Normalitas.....	75
19. Uji Multikolinearitas	76
20. Uji Heterokedastisitas	76

21. Uji Model Substruktur I	77
22. Koefisien Regresi Substruktur I.....	77
23. Uji Model Substruktur II	78
24. Koefisien Regresi Substruktur II.....	78
25. Uji F	80
26. Uji t	81
27. Koefisien Determinasi.....	82
28. Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	39
2. Struktur Lengkap Pengaruh Antar Variabel.....	52
3. Substruktur I Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Intervening	53
4. Substruktur II Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen	53
5. Diagram Jalur Pengaruh X_1 Terhadap X_2	77
6. Diagram Jalur Pengaruh X_1 dan X_2 Terhadap Y	79
7. Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 Terhadap Y	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan daerah tidak luput dari imbas sistem reformasi yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif keuangan khususnya instansi pemerintah, reformasi sudah mulai dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum seperti peraturan-peraturan mengenai daerah otonom, pengenalan perangkat teknologi untuk mempercepat proses organisasi, dan pengenalan serta kewajiban untuk menerapkan sistem organisasi dengan berbasiskan *good governance* kepada instansi pemerintah. Menurut Syakhroza (2003), *good governance* selalu mengacu kepada sikap, etika, praktek dan nilai-nilai masyarakat. Salah satu pilar utama sistem *good governance* adalah akuntabilitas. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia pasca reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah melalui laporan keuangan yang melaporkan aktivitas pengelolaan keuangan di instansi pemerintah.

Mengingat pentingnya laporan keuangan suatu organisasi, maka laporan keuangan harus disusun sebaik mungkin sesuai dengan data yang akurat sesuai aturan akuntansi yang berlaku. Menurut PSAK No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan revisi tahun 2009 Paragraf ke 24 menyebutkan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Namun pada kenyataannya masih terjadi tindakan penyimpangan pada laporan keuangan suatu instansi pemerintahan, sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Tindakan penyimpangan dalam laporan keuangan ini merupakan salah satu tindakan kecurangan akuntansi. Tindakan yang dilakukan dapat berupa penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001) dalam Wilopo (2006), mendefinisikan kecurangan akuntansi sebagai :

Kecurangan akuntansi adalah salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kecurangan akuntansi merupakan kesengajaan untuk melakukan tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam

laporan keuangan. Namun, kesempatan untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Secara umum, manajer suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada pegawainya. Biasanya, pihak manajer melakukan kecurangan untuk kepentingan instansi, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan, sedangkan pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva. Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penggelapan aktiva tersebut umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal organisasi tersebut.

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Terdapat opini bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis (Soepardi, 2007:24). Indikasi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Kecenderungan kecurangan akuntansi meliputi berbagai bentuk, seperti tendensi untuk melakukan tindak korupsi,

tendensi untuk penyalahgunaan aset, dan tendensi untuk melakukan pelaporan keuangan yang menipu (Thoyibatun, 2009).

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang peringkat indeks korupsinya berada di posisi 64 dari 177 negara di dunia (*Transparency International*, 2013). Pada sektor publik kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggara pemilu, dan DPRD.

Adapun fenomena yang terjadi pada saat ini adalah kasus yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 334.395.000 atas dana DAK Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Kali ini dua tersangka yaitu “KD” yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, dan “SS” yang menjabat sebagai Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang tersandung kasus penyelewengan DAK dengan anggaran Rp 5 miliar lebih secara resmi ditahan oleh Kejari Padang Panjang menyangkut proyek pengadaan buku dan alat peraga tahun 2011 tingkat SMP.

Lelang akhirnya dimenangkan oleh CV Kenjita dengan dana sebesar Rp 334.395.000. Kemudian anggaran tersebut dicairkan oleh Zalnadi selaku wakil direktur CV Kenjita tanggal 31 Desember 2011. Setelah dilakukan pengecekan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Jakarta ditemukan sebanyak 603 judul buku tidak memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar dikarenakan terdakwa

“KD” dan “SS” tidak melakukan pengawasan sehingga negara dirugikan sebesar Rp 334.395.000 sesuai hasil audit BPKP perwakilan Sumatera Barat.

“Penahanannya dilakukan karena telah memenuhi unsur melakukan penahanan, sambil terus melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka dan saksi”, sebut Resmen kepada sejumlah wartawan yang terus mengikuti perkembangan kasus tersebut. Disebutkan Resmen, upaya penahanan yang dilakukan terhadap kedua tersangka untuk menghindari upaya-upaya yang tidak diinginkan selama penyidikan, seperti menghilangkan barang bukti dan melarikan diri (<http://www.sumbaronline.com>).

Salah satu cara mengindikasikan terjadinya kecurangan akuntansi adalah dengan melihat apakah audit intern sudah dijalankan dengan baik dalam suatu organisasi. Audit intern yang dilaksanakan dengan baik dan memadai akan mempengaruhi sistem pengendalian intern pemerintah. Semakin baik audit intern, maka pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah juga akan baik. Dari kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang belum sepenuhnya menerapkan audit intern dan sistem pengendalian intern pemerintah dengan baik sehingga kasus diatas bisa terjadi.

Tujuan akhir dari proses auditing adalah menghasilkan laporan audit. Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai dalam membaca sebuah laporan keuangan. Menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan, yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*).

Kedua karakteristik tersebut sangat sulit diukur sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga, yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan, serta dapat meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Audit intern muncul karena adanya kebutuhan organisasi yang semakin kompleks. Auditor intern ditunjuk untuk mengaudit kinerja organisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tanpa audit intern, pimpinan tidak memiliki sumber informasi bebas mengenai kinerja organisasi (Bachtiar Asikin, 2010).

Audit intern memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan akuntansi dalam organisasi dengan memastikan bahwa audit direncanakan dengan baik dengan program audit intern yang wajar. Amin Widjaja Tunggal (2012:134) juga menyebutkan bahwa salah satu faktor internal yang meningkatkan kemungkinan kecurangan akuntansi adalah audit intern yang tidak memadai.

Pada dasarnya audit intern diarahkan untuk membantu seluruh anggota pimpinan agar mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan ekonomis. Bantuan tersebut disampaikan kepada para anggota pimpinan dengan berbagai penilaian, analisis, kesimpulan, dan konsultasi yang diberikan. Kegiatan audit intern adalah sebagai berikut (Akmal, 2007) :

- a. Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen.
- b. Mengidentifikasi dan mengukur risiko.

- c. Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan rencana, prosedur, peraturan, dan perundang-undangan.
- d. Memastikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aktiva.
- e. Menentukan tingkat keandalan data atau informasi.
- f. Menilai apakah penggunaan sumber daya sudah ekonomis dan efisien, serta apakah tujuan organisasi sudah tercapai.
- g. Mencegah dan mendeteksi kecurangan.
- h. Memberikan jasa.

Dengan demikian, peranan audit intern terhadap penanggulangan kecurangan akuntansi sangat penting, karena tanpa adanya audit intern yang berjalan dengan baik, terjadinya praktek kecurangan akuntansi akan sulit dideteksi dan ditanggulangi. Agar risiko terjadinya kecurangan ini dapat ditekan serendah mungkin, organisasi harus melakukan optimalisasi peranan audit intern yang dimilikinya. Di lain pihak, auditor eksternal cenderung menekankan keterbatasan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan akuntansi dan tidak menanggapinya sebagai aspek positif (AICPA, 1978).

Meski kecurangan akuntansi diduga sudah menahun, namun di Indonesia belum terdapat kajian teoritis dan empiris secara komprehensif. Oleh karena itu, fenomena ini tidak cukup hanya dikaji oleh ilmu akuntansi tetapi perlu melibatkan disiplin ilmu yang lain. Terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan fenomena ini. Salah satunya adalah teori atribusi.

Teori atribusi menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh atribut penyebab. Tindakan seorang pemimpin maupun orang

yang diberi wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab. Tindakan curang dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian intern dan monitoring oleh atasan.

Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian intern yang efektif. Efektivitas pengendalian intern merupakan faktor yang mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian intern memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyansi, 2004). Pengendalian intern yang efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi.

Menurut Amin (2009), untuk mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi, diperlukan pengendalian intern yang ketat. Pengendalian intern yang efektif akan mempersulit seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, kecuali terdapatnya suatu kolusi. Selain itu, *National Commission On Fraudulent Financial Reporting* dalam Amin (2009) juga menyatakan bahwa pengendalian intern sangat penting dalam mengurangi kecurangan akuntansi.

Menurut COSO (*Communication Of Sponsoring Organization*) dalam Santoyo Gondodiyoto (2009:153), sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang melibatkan *board of director*, manajemen, komite audit, audit intern, dan seluruh anggota organisasi yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu efektifitas dan efisiensi operasi, mendorong keandalan laporan keuangan, serta mematuhi hukum dan peraturan yang ada.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu, (a) memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintah, (b) keandalan pelaporan keuangan, (c) pengamanan aset negara, dan (d) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian Gusnardi (2008:61) dijelaskan bahwa tanggung jawab komite audit antara lain memastikan bahwa pengendalian intern pemerintah dalam organisasi tersebut berjalan dengan baik. Kegiatan audit intern adalah menguji dan menilai efektifitas dan kesuksesan sistem pengendalian intern dalam organisasi dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial telah diidentifikasi (Mulyadi, 2009:211).

Audit intern harus bisa memastikan apakah kecurangan akuntansi ada atau tidak. Untuk memastikannya, audit intern akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern yang dibuat organisasi dan aktivitas pegawai

berdasarkan kriteria yang tepat untuk merekomendasikan suatu rangkaian tindakan yang diambil suatu organisasi. Disamping itu, audit intern harus mempunyai alat pengendalian yang efektif sehingga kecurangan akuntansi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

Ruslina Lisda (2007:94) menyimpulkan kompetensi dan objektivitas fungsi auditor intern mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern baik secara simultan maupun secara parsial pada hotel bintang empat dan lima di kota Bandung. Hal ini berarti dengan semakin kompeten dan objektifnya fungsi auditor intern, maka pelaksanaan sistem pengendalian intern akan semakin baik dan memadai.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Peran Audit Intern dan Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui sebagai berikut :

1. Sejauhmana peran audit intern berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Sejauhmana efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

3. Sejauhmana peran audit intern berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah?
4. Sejauhmana peran audit intern berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh peran audit intern terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Pengaruh efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Pengaruh peran audit intern terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah.
4. Pengaruh peran audit intern terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan dan manfaat bagi instansi pemerintah, pembaca, peneliti lain, maupun bagi penulis sendiri.

1. Bagi penulis

- a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Menghasilkan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dan praktik yang sesungguhnya terjadi.

2. Bagi akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu bagi dunia akademik mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pendidik diharapkan dapat mengembangkan konsep pendidikan etika dengan lebih memperhatikan perkembangan moral ataupun perkembangan pertimbangan etis mahasiswa. Dengan demikian, hal ini dapat membentuk perilaku etis mahasiswa sebagai calon akuntan sejak dini.

3. Bagi entitas pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah agar lebih akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang berasal dari publik.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau penelitian yang sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

a. Pengertian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul *Fraud Auditing* mendefinisikan “kecurangan sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan”. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2003), yang dimaksud dengan :

Kecurangan dapat didefinisikan sebagai suatu salah saji dari suatu fakta yang bersifat material yang diketahui tidak benar atau dilakukan dengan sengaja, dengan maksud menipu pihak lain yang mengakibatkan pihak lain dirugikan.

Agus Sukrisno (2004) dalam bukunya berjudul *Auditing, Pemeriksaan Akuntansi* mendefinisikan kecurangan sebagai :

Kecurangan adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Dalam hukum pidana secara umum disebut dengan "pencurian dengan penipuan", "pencurian dengan tipu daya atau muslihat", "pencurian dengan penggelapan dan penipuan", atau hal serupa lainnya. Ada pula yang mendefinisikan kecurangan sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya organisasi secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kecurangan adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya.

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan organisasi membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh organisasi. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan atau pihak ketiga.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001) dalam Wilopo (2006) mendefinisikan kecurangan akuntansi sebagai :

Kecurangan akuntansi adalah salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Ada pula yang mendefinisikan kecurangan akuntansi sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya organisasi secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kecurangan adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah mengubah aset/kekayaan organisasi yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya.

Dengan demikian perbuatan yang dilakukannya adalah untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dibidang keuangan atau keuntungan lainnya, atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain (Suhermadi, 2006).

Dari beberapa pengertian kecurangan di atas, maka tergambar bahwa yang dimaksud dengan kecurangan akuntansi adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Menurut Romney (2006:333), dalam buku berjudul *System Information Accounting*, terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab kecurangan, yaitu: rasionalisasi (*rationalization*), tekanan (*pressure*) dan kesempatan (*opportunity*). Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah:

- a. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*).
- b. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*).

- c. Fakta bersifat material (*material fact*).
- d. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*).
- e. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi.
- f. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*).
- g. Yang merugikannya (*detriment*).

Menurut Amin (2012:133), faktor-faktor internal yang meningkatkan kemungkinan kecurangan akuntansi mencakup :

- a. Imbalan yang tidak memadai.
- b. Pengendalian manajemen yang tidak memadai.
- c. Kelemahan atau tidak memadainya penegakan dan mekanisme umpan balik kinerja.
- d. Dukungan yang tidak memadai (sumber daya manusia).
- e. Penelaahan operasi yang tidak memadai (audit intern).
- f. Kelemahan penegakan aturan disiplin.
- g. Berkembangnya permusuhan.
- h. Masalah motivasi lainnya.

Selain faktor-faktor diatas, kecurangan akuntansi dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian intern dan monitoring oleh atasan. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian intern yang efektif. Keefektifan pengendalian intern merupakan faktor yang mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian intern memegang

peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengendalian intern yang efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi.

Menurut Amin (2009), untuk mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi, diperlukan pengendalian intern yang ketat. Pengendalian intern yang efektif akan mempersulit seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan kecuali terdapatnya suatu kolusi. Selain itu, *National Commission On Fraudulent Financial Reporting* juga menyatakan bahwa pengendalian intern sangat penting dalam mengurangi kecurangan akuntansi.

b. Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan Akuntansi

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Factor pendorong kecurangan dapat diartikan sebagai pola pemanfaatan “kesempatan/peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan.

Menurut Simanjuntak (2008:122) dalam Petra Zulia Aranta (2013) menyatakan terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan Teori GONE, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan)

Keserakahan merupakan perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang. Keserakahan akan menuntut pemenuhan

melebihi yang dibutuhkan. Faktor ini tidak tergantung pada level atau jabatan, oleh karena itu setiap orang memiliki potensi untuk melakukan kecurangan. Yang membedakannya adalah batasan moralitas dan nilai-nilai sosial yang diyakininya.

2. *Opportunity* (kesempatan)

Kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan, dan ini sangat tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan, ada yang mempunyai kesempatan yang besar dan ada yang kecil.

3. *Need* (kebutuhan)

Kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Kebutuhan berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh dengan konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tidak pernah usai. Kebutuhan yang muncul dalam setiap diri manusia selalu membuahkan upaya untuk memenuhinya dengan jalan apapun.

4. *Exposure* (pengungkapan)

Pengungkapan merupakan faktor yang berada pada pengendalian organisasi. Pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh para pelaku kecurangan. Sanksi sebagai kelanjutan dari pengungkapan suatu kecurangan belum menjamin tidak

terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama atau yang lain. Semakin lemah pengungkapan dan tindak lanjut dari kecurangan tersebut, maka semakin banyak orang terdorong melakukannya. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan harus dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

Greed dan *Need* termasuk dalam faktor individu yang bersifat sangat personal dan diluar kendali organisasi sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan anggaran.

Opportunity dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih didalam kendali organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat curang karena pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *Exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku kecurangan tergolong ringan sehingga para karyawan tidak merasa takut apabila melakukan kecurangan.

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan adalah tekanan, baik tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena organisasi tidak menindak tegas pelaku kecurangan sehingga tidak membuat efek jera bagi pelaku tersebut.

2. Peran Audit Intern

a. Pengertian Audit Intern

Menurut *Sawyers* (2005:10), yang dimaksud dengan audit intern adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan :

- a. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan.
- b. Risiko yang dihadapi perusahaan atau organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi.
- c. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti.
- d. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi.
- e. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
- f. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif, semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Institute of Internal Auditor (IIA) dikutip oleh Messier (2005:514)

mendefinisikan audit intern sebagai :

Audit intern adalah aktifitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi.

Menurut Valery G. Kumat (2011:35), audit intern adalah :

Audit intern adalah agen yang paling “pas” untuk mewujudkan *Internal Control, Risk Management*, dan *Good Corporate Governance* yang akan memberi nilai tambah bagi sumber daya dan perusahaan.

Dengan demikian, audit intern mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Perlunya konsep audit intern dikarenakan bertambah luasnya ruang lingkup suatu organisasi.

b. Fungsi dan Kedudukan Audit Intern

Audit intern muncul karena adanya kebutuhan organisasi yang semakin kompleks. Auditor intern ditunjuk untuk mengaudit kinerja organisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tanpa audit intern, pimpinan tidak memiliki sumber informasi bebas mengenai kinerja organisasi (Bachtiar Asikin, 2010).

Audit intern memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan akuntansi dalam organisasi dengan memastikan bahwa audit direncanakan dengan baik dengan program audit intern yang wajar. Amin (2012:134) juga menyebutkan bahwa salah satu faktor internal yang meningkatkan kemungkinan kecurangan adalah audit intern yang tidak memadai.

Peranan audit intern terhadap penanggulangan kecurangan akuntansi sangat penting, karena tanpa adanya audit intern yang berjalan dengan baik, terjadinya praktek kecurangan akuntansi akan sulit dideteksi dan ditanggulangi. Agar risiko terjadinya kecurangan ini dapat ditekan serendah mungkin, organisasi harus melakukan optimalisasi peranan audit intern yang dimilikinya. Di lain pihak, auditor eksternal cenderung menekankan keterbatasan kemampuan auditor

mendeteksi kecurangan dan tidak menanggapinya sebagai aspek positif (AICPA, 1978).

Coram *et al* (2008) menemukan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit intern akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi dan melaporkannya sendiri. Hogan *et al* (2008) juga menemukan bahwa auditor internal berpengaruh penting dalam mengurangi faktor kesempatan dalam kecurangan akuntansi.

Penerapan fungsi audit intern dalam organisasi tidaklah selalu sama. Secara umum, fungsi audit intern dalam organisasi adalah untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, karena fungsi audit intern adalah bagian dari aktifitas pengawasan, maka auditor independen harus cukup memahami fungsi itu untuk mengidentifikasi aktifitas audit intern yang relevan dengan perencanaan audit.

Fungsi audit intern menurut Mulyadi (2002:211) adalah :

- a. Fungsi audit intern adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan berbagai unit organisasi. Dengan demikian, fungsi audit intern merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.
- b. Fungsi audit intern adalah merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain yang memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara

menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor intern menyediakan jasa tersebut. Audit intern berhubungan dengan semua tahap kegiatan organisasi, sehingga tidak hanya terbatas pada audit sebagai catatan akuntansi.

Kedudukan ataupun status audit intern dalam suatu struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan, peranan, serta tingkat kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Kedudukan audit internal hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga auditor internal dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik. Kedudukan audit intern dalam suatu organisasi yang satu dengan yang lain belum tentu sama, karena hal ini tergantung pada situasi dan kondisi organisasi serta tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan bagian audit intern.

c. Kegiatan dan Peranan Audit Intern

Menurut Mulyadi (2002), kegiatan yang dilakukan dalam audit intern antara lain:

- a. Mengevaluasi dan merekomendasi perbaikan pengelolaan risiko pengendalian dan kebijakan perusahaan.
- b. Meyakinkan kebenaran dan kesesuaian tingkat pelaporan.
- c. Memeriksa dan memberi pendapat untuk perjanjian, keputusan kontrak kerja, dan sistem penggajian.
- d. Memeriksa rencana audit tahunan.

- e. Memeriksa kualitas dan kuantitas dari staf.
- f. Memeriksa hasil audit.
- g. Memberikan jaminan kualitas bagi organisasi.

Kegiatan audit intern juga mempunyai peranan yang cukup beragam dalam praktiknya, antara lain sebagai :

a. Konsultan

Auditor internal dapat menjadi konsultan bagi pihak organisasi mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk pengembangan operasi organisasi, atau dalam penilaian keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi.

b. Pelaksana auditing

Tugas awal dari auditor intern adalah melaksanakan audit terhadap berbagai aspek dalam organisasi, baik secara akuntansi maupun secara manajemen.

c. Analisis investasi

Sebelum memutuskan akan melakukan investasi, organisasi dapat meminta pendapat auditor intern untuk menilai langkah yang akan diambil dan kompetensi investasi itu sendiri.

d. Penilai pasar

Seorang auditor internal memiliki dasar-dasar akuntansi dan manajemen yang baik, serta menilai efektifitas langkah-langkah yang direncanakan oleh organisasi.

e. Perencana strategi organisasi

Auditor intern dapat memberikan pendapat dalam perancangan strategi operasi, pengendalian, ataupun kebijakan yang akan ditetapkan organisasi berdasarkan hasil audit yang dilaksanakannya untuk dapat membantu organisasi meningkatkan kinerjanya dimasa depan.

f. Pelaksana sistem pengendalian

Sistem pengendalian yang diterapkan dalam organisasi merupakan salah satu alat audit yang digunakan oleh auditor intern, yang menilai kesesuaian pelaksanaannya secara langsung dalam praktek operasional organisasi.

g. Perancang sistem pengendalian

Apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian sebelumnya, auditor intern dapat memberikan pendapatnya pada pihak manajemen untuk dapat memperbaiki sistem tersebut dan mencegah kesalahan yang sama terulang dikemudian hari.

h. Penilai performa manajemen

Kegiatan audit intern merupakan kegiatan penilaian mengenai performa manajemen untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan saran untuk perbaikan yang mungkin dibutuhkan.

d. Standar Profesional Audit Intern

Menurut Hery (2010:73), standar profesional audit intern terbagi atas empat macam, antara lain:

1. Independensi

a. Mandiri dan objektif

Audit intern harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor intern dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian audit intern sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Status organisasi audit intern harus dapat memberikan keleluasaan bagi audit intern dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal.

2. Kemampuan profesional

a. Pengetahuan dan kemampuan

Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh auditor intern. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit intern harus menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

b. Pengawasan

Pimpinan audit intern bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang

dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

c. Ketelitian profesional

Audit intern harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan pemeriksaan. Audit intern harus mewaspadaikan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan (ketidakefisienan), dan konflik kepentingan.

3. Lingkup pekerjaan

a. Keandalan informasi

Audit intern harus menguji sistem informasi tersebut, dan menentukan apakah berbagai catatan, laporan finansial, dan laporan operasional perusahaan mengandung informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap, dan berguna.

b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan

Manajemen bertanggung jawab menetapkan sistem yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan, seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan. Audit intern bertanggung jawab menentukan apakah sistem tersebut telah cukup efektif, dan apakah berbagai kegiatan yang diperiksa telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

c. Perlindungan aktiva

Audit intern harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aktiva perusahaan terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, dan kegiatan yang ilegal. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu aktiva, audit intern harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

d. Penggunaan sumber daya

Audit intern harus dapat memastikan keekonomisan dan keefisienan penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi.

e. Pencapaian tujuan

Audit intern harus dapat memberikan kepastian bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

a. Perencanaan kegiatan pemeriksaan

Audit intern harus terlebih dahulu melakukan perencanaan pemeriksaan yang meliputi penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan, memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa, penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan, dan pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu.

b. Pengujian dan pengevaluasian

Audit intern harus melakukan pengujian dan pengevaluasian terhadap semua informasi yang ada untuk memastikan ketepatan dari informasi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan.

c. Pelaporan hasil pemeriksaan

Audit intern harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Laporan yang dibuat harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu. Audit intern juga harus langsung melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan dan karyawan lain apabila membutuhkan.

d. Tindak lanjut pemeriksaan

Audit intern harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan memberikan hasil yang diharapkan. Tindak lanjut audit intern didefinisikan sebagai suatu proses menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari tindakan yang dilakukan manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

3. Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah :

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern menentukan kualitas laporan keuangan yang baik sehingga bebas dari unsur kecurangan.

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan :

Pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Ada empat fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu : (a) memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintah (b) keterandalan pelaporan keuangan, (c) efisiensi dan efektifitas operasi, dan (d) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Menurut *Alvin A. Arens* dalam buku berjudul *Auditing dan Pelayanan Verifikasi* (2004:396), yang dimaksud dengan “sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sarannya.”

Mulyadi (2002:181) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian intern berkaitan dengan proses-proses dan praktik-praktik dimana manajemen suatu organisasi berusaha untuk memastikan bahwa keputusan- keputusan dan aktivitas-aktivitas yang disetujui benar-benar diambil dan dilaksanakan (Sukrisno Agoes, 2009:232).

Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. Selain itu juga untuk memperjelas bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berada dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pengendalian bukanlah sesuatu yang ditumbuhkan dalam proses manajemen tersebut, tetapi merupakan integral dalam proses tersebut.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut (Glifandi, 2011). Peluang tersebut dapat diminimalisir dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif. Sistem pengendalian intern yang efektif akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. AICPA (1947) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi organisasi terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (Boynton and Kell, 1996).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), pengendalian intern merupakan suatu proses dimana manajemen memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Untuk mengawasi itulah diperlukan sistem pengendalian intern yang independen sebagai penengah dan pencegah apabila nantinya terdapat suatu kecurangan yang terjadi di sebuah unit organisasi.

Menurut Amin (2009), untuk mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi, diperlukan pengendalian intern yang ketat. Pengendalian intern yang efektif akan mempersulit seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, kecuali terdapatnya suatu kolusi. Selain itu, *National Commission On Fraudulent Financial Reporting* dalam Amin (2009) juga menyatakan bahwa pengendalian intern sangatlah penting dalam mengurangi kecurangan akuntansi.

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi kompeten (Noviyanti, 2004). Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2005).

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut tujuannya, pengendalian intern dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian

intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Mulyadi, 2001).

Sistem pengendalian intern yang efektif akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi (Abott et al dikutip oleh Wilopo, 2006). Menurut *Committee of Sponsoring Organization* dari *Treadway Commission* (COSO), sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi organisasi, manajemen, dan personel lainnya, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai akan tercapainya tujuan dalam kategori berikut (BPK, 2009 dalam Prasetyo, 2011) :

- a. Efektifitas dan efisiensi operasi
- b. Keandalan pelaporan keuangan
- c. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku

Menurut Prasetyo (2011), tujuan pengendalian intern adalah menjamin manajemen organisasi agar :

- a. Tujuan yang ditetapkan akan dapat dicapai.
- b. Laporan keuangan yang dihasilkan organisasi dapat dipercaya.
- c. Kegiatan organisasi sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern merupakan komponen penting dalam suatu organisasi dan menjadi dasar kegiatan-kegiatan organisasi yang sehat dan aman, menjaga agar aset organisasi tetap aman, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Selain itu, pengendalian yang cukup dan efektif dapat memperkecil celah bagi para pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan yang merugikan organisasi dan menguntungkan mereka sendiri. Semakin efektif pengendalian intern maka semakin dapat dicegah terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi.

c. Elemen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas lima elemen, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini :

- a. Integritas dan nilai-nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Partisipasi dewan direksi atau komite audit
- d. Filosofi dan gaya operasional manajemen
- e. Struktur organisasi
- f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Inti dari organisasi yang dikendalikan secara efektif terletak pada sikap manajemennya. Jika manajemen puncak percaya bahwa pengendalian memang penting, anggota organisasi lainnya akan merasakan hal itu dan menanggapi dengan mengamati secara hati-hati pengendalian yang

ditetapkan. Jika anggota organisasi itu merasa bahwa pengendalian tidak begitu diperhatikan oleh manajemen puncak, hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian manajemen tidak akan tercapai secara efektif.

2. Penilaian risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Setelah mengidentifikasi suatu risiko, organisasi mengestimasi signifikansi risiko itu, menilai kemungkinan terjadinya risiko itu, dan mengembangkan tindakan khusus yang diperlukan untuk mengurangi risiko itu ke tingkat yang dapat diterima.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan organisasi.

Aktivitas pengendalian meliputi :

- a. Review kinerja
- b. Pengolahan informasi
- c. Pengendalian fisik
- d. Pemisahan tugas

4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah.

- b. Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan keuangan.
- c. Mengukur nilai pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya.
- d. Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk suatu sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

B. Evaluasi Hasil Penelitian Terdahulu

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wilopo / 2006	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Penelitian ini membuktikan bahwa perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal.
2.	Lisa Amelia Herman / 2012	Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kecurangan	Penelitian ini membuktikan bahwa keadilan organisasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan.
3.	Ratna Amalia / 2013	Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan	Penelitian ini membuktikan bahwa audit intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan.
4.	Novita Puspasari dan Eko Suwardi	Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Penelitian ini membuktikan bahwa kondisi elemen pengendalian internal mempunyai hubungan antara level moral individu dengan kecenderungan kecurangan akuntansi.
5.	Lia Meliany	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap	Penelitian ini membuktikan bahwa keefektifan pengendalian internal

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.	dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan variabel eksogen adalah peran audit intern dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah.

Audit intern memainkan peranan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan akuntansi dalam organisasi dengan memastikan bahwa audit direncanakan telah dengan baik, dan program audit intern yang wajar. Tanpa adanya audit intern yang berjalan dengan baik, terjadinya praktik kecurangan akuntansi akan sulit dideteksi dan ditanggulangi. Agar risiko terjadinya kecurangan ini dapat ditekan serendah mungkin, organisasi harus melakukan optimalisasi peranan audit intern yang dimilikinya.

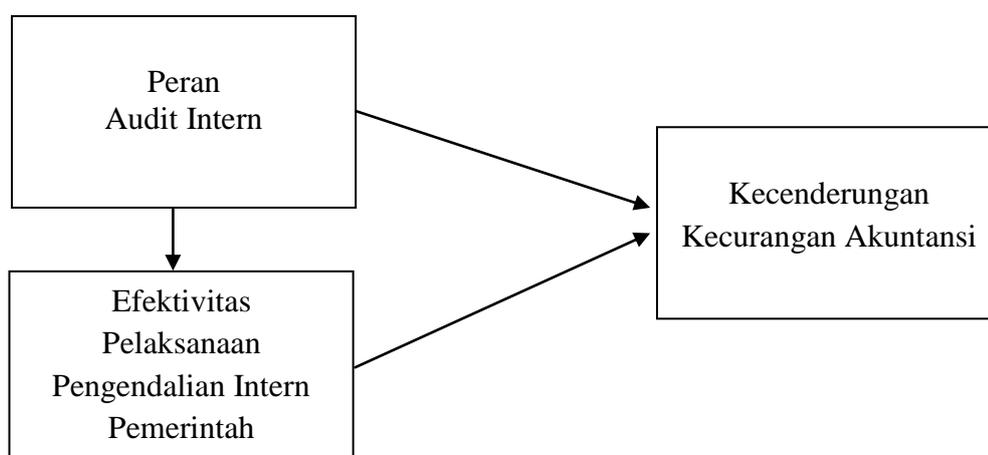
Efektivitas pelaksanaan pengendalian intern merupakan faktor yang mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian intern memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data

akuntansi menjadi tidak kompeten. Pengendalian intern yang efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi.

Tanggung jawab audit intern antara lain memastikan bahwa pengendalian intern dalam organisasi tersebut berjalan dengan baik. Kegiatan audit intern adalah menguji dan menilai efektifitas dan kesuksesan sistem pengendalian intern dalam organisasi dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial telah diidentifikasi.

Kompetensi dan objektivitas fungsi auditor intern mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern baik secara simultan maupun secara parsial pada hotel bintang empat dan lima di kota Bandung. Hal ini berarti dengan semakin kompeten dan objektifnya fungsi auditor internal, maka pelaksanaan sistem pengendalian internal akan semakin baik dan memadai.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuat kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1: Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Peran audit intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- H₂ : Efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- H₃ : Peran audit intern berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh Peran Audit Intern dan Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Peran Audit Intern berpengaruh signifikan positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,088 > 2,0117$ atau $sig < \alpha$ yaitu $0,042 < 0,05$ dan koefisien regresi (β) bernilai positif 0,330.
2. Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,184 > 2,0117$ atau $sig < \alpha$ yaitu $0,003 < 0,05$ dan koefisien regresi (β) bernilai negatif 0,503.
3. Peran Audit Intern berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,536 > 2,0117$ atau $sig < \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi (β) bernilai positif 0,548.
4. Peran Audit Intern berpengaruh signifikan positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi melalui Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah dengan besarnya pengaruh tidak langsung sebesar 9,1%. Selain itu dapat dilihat dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,155 > 3,200$ atau $sig < \alpha$ yaitu $0,009 < 0,05$.

B. KETERBATASAN

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wilayah penelitian hanya kota Padang Panjang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
2. Terkait dengan variabel kecenderungan kecurangan akuntansi, dinas terkait tidak mengisi kuesioner dengan tepat sehingga kasus kecurangan yang terjadi pada dinas tersebut kurang terlihat.
3. Dari model penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 14,5%. Sedangkan 85,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti, sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

C. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa auditor intern harus berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing sehingga kasus kecurangan akuntansi dapat dikurangi dalam organisasi tersebut.
2. Terkait dengan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah, bahwa efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah harus ditingkatkan agar kecurangan akuntansi dapat dihindari. Hal itu bisa

dilakukan apabila organisasi meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan organisasi sehingga kecurangan akuntansi dapat dikurangi.

3. Penelitian ini masih terbatas pada peran audit intern dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel lain yang berpengaruh.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survey lapangan, dan lain-lain.